

Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan: Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tonasa Kecamatan Kabupaten Gowa

Ashar Prawitno (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Faried Ali (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Andi M. Rusli (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: asharpawitno@yahoo.com

Abstract

This study aims to get a picture of participation in the implementation of development in Tonasa village the district of Tombolo Pao, Gowa Town. and the factors that influence society participation in development in the Village District Tonasa Tombolo Pao Gowa. This type of research is used is descriptive. Basis of the study is a survey method. The results of this study indicate that the participation of society in the construction of the Village, among others participation in the form of ideas or thoughts, participation in the form of power, participation in the form of money or material, and participation in evaluating development results.

Keywords: *democratization, participation, development*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh gambaran tentang demokratisasi dengan ditinjau dari partisipasi masyarakat Dalam pelaksanaan pembangunan di desa Tonasa kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Dasar penelitian yang digunakan adalah metode survey. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang atau materi, dan partisipasi dalam mengevaluasi hasil pembangunan.

Kata kunci: *demokratisasi, partisipasi, pembangunan*

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu bangsa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara terencana, gradual, bertahap, komprehensif, holistik, sistemik, bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan melibatkan peran serta seluruh elemen warga bangsa. Sinergitas yang tinggi antara pemerintah, sektor privat dan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa.

Seperti halnya tujuan pembangunan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Strategi pembangunan Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan demokratisasi masyarakat terutama di pedesaan. Pembangunan desa bersifat multisektoral dalam arti pertama sebagai metode pembangunan masyarakat sebagai subyek pembangunan; kedua sebagai program dan ketiga sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran un-

tuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan catatan statistik diketahui bahwa hampir 80% penduduk di Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan aset pembangunan, apabila dikembangkan dan diaktifkan secara intensif dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. Otonomi Daerah seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah di harapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di desa.

Otonomi desa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki arti bahwa desa mampu berinisiatif atau berkreatifitas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri serta menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga desa memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan, dan tidak terbebani lagi dengan program-program pembangunan dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Desa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki arti bahwa: "Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk menga-

tur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Demokratisasi masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab sampai pemanfaatan pembangunan akan bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat dan tidak hanya diserap oleh pihak-pihak tertentu.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan sendiri merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus. Pemberdayaan masyarakat antara lain dilakukan melalui demokratisasi masyarakat. Demokratisasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya. Keberhasilan otonomi di desa di satu pihak membutuhkan tingkat demokratisasi dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Di lain pihak, proses otonomi dapat memberikan kesempatan berdemokratisasi dalam menempatkan kekuatan dan sumber daya menjadi lebih dekat, dan lebih jelas, sehingga mudah diatur oleh pemerintahan desa. Dalam lingkungan dimana budaya demokratisasi masyarakat sangat rendah, otonomi dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan kesempatan yang bersifat rutin dan teratur bagi interaksi masyarakat.

Semakin melembaganya demokratisasi masyarakat desa dalam pembangunan akan bermuara pada swakelola desa secara mandiri. Konsep demokratisasi yang di maksud disini adalah partisipasi langsung oleh masyarakat dengan mandiri. Meskipun demikian, konsep mandiri bukanlah suatu konsep yang

sempit dan statis, sekedar menempatkan kemampuan masyarakat desa untuk membiayai pembangunan. Dalam konteks demokratisasi disini adalah partisipasi masyarakat secara mandiri dengan keswadayaan, yang mengandung arti yang luas daripada sekedar perimbangan tanggung jawab pembiayaan pembangunan. Konsep mandiri berarti perimbangan kekuatan antara masyarakat desa dan negara dalam menentukan arah tujuan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam memberdayakan masyarakat desa, selain dilakukan reorientasi peran pemerintah pusat, juga secara sistematis dan konsisten melakukan penyadaran terhadap masyarakat desa melalui isu-isu lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Upaya yang dilakukan lebih bersifat partisipatoris sehingga mampu menumbuhkan kemampuan masyarakat lokal. Strategi lain adalah melakukan tekanan secara politik terhadap institusi-institusi lokal seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif khususnya yang menyangkut fungsional kinerja mereka. Tekanan ini dimaksudkan untuk mendorong perbaikan-perbaikan pada kinerja institusi-institusi formal tersebut agar mampu merespon, merencanakan serta melaksanakan aspirasi-aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat.

Demokratisasi yang mengarah pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ini mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat, pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa "tidak memiliki" dan "acuh tak acuh" terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang

paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat desa yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai "pengetahuan lokal" untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut.

Bertitik tolak pada sejauh mana masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, terutama di desa Tonasa kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh melalui penelitian yang berjudul "Demokratisasi dalam pelaksanaan pembangunan (Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)".

METODE PENELITIAN

Tipe yang digunakan dalam pemecahan permasalahan adalah deskriptif. Dasar penelitian yang digunakan adalah metode survey. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian di desa Tonasa kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa. Bab ini menguraikan tentang karakteristik responden, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa Tonasa dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Pembangunan yang dimaksud dengan dengan fokus penelitian yaitu pembangunan fisik infrastruktur jalan desa/tani di desa Tonasa.

Karakteristik Responden, sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa

teknik penarikan sample pada penelitian ini adalah purposive sampling, maka pemilihan sampel responden telah dilakukan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 35 orang. Ke-35 orang tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda, baik dari segi umur, pendidikan, maupun pekerjaan.

Usia Responden, usia 40-49 merupakan frekuensi yang paling banyak di lokasi penelitian. Peneliti mendapatkan bahwa pada usia ini, pengetahuan masyarakat desa ter-bilang sudah tinggi, dan sesuai dengan metode pengambilan sampel, Purposive Sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut-paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya serta dianggap mampu memberikan informasi dan data-data yang akurat.

Berdasarkan komposisi responden pada jenis kelamin, responden pada laki-laki sebesar 74,28 % atau 26 orang, sedangkan pada perempuan sebesar 25,71 % atau 9 orang.

Berdasarkan rasio diatas, jumlah responden laki-laki merupakan yang paling banyak, hal ini didasari karena responden laki-laki selalu bergelut dengan aktivitas keseharian jadi lebih mengetahui tentang permasalahan. Sedangkan perempuan merupakan pekerja pasif di rumah.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu hal yang utama dalam pencapaian hasil penelitian ini. Tingkat pendidikan pada re-sponden sangat berpengaruh pada kemampuan memberikan informasi terkait dengan objek penelitian ini. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah dan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi akan dapat melihat serta memahami persoalan yang dibutuhkan dalam pembangunan di desa.

Berdasarkan tabel 4.4, pekerjaan yang paling banyak adalah petani dengan 18 orang atau 51,42%, Guru status PNS/Honorer 6 orang atau 17,14%, Wiraswasta dan Lainnya masing masing 3 orang atau 8,57%, PNS di Instansi lain 2 orang atau 5,71%. Pekerjaan

lain yang dimaksud disini terbagi atas beberapa antara lain IRT, penyadap,serta sopir.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan

n = 35

Jenis pekerjaan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Pedagang	3	8,57
Petani	18	51,42
PNS	2	5,71
Guru	6	17,14
Pns/honorer	3	8,57
Wiraswasta	3	8,57
Lainnya		
Jumlah	35	100

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, November 2011.

Sesuai dengan teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yang dilakukan secara "Purposive Sampling" maka peneliti sengaja memeta-petakan responden agar dapat menentukan jawaban yang bisa diharapkan dalam pengembangan penelitian ini dengan harapan bahwa responden akan mampu memberikan informasi dan data-data yang akurat.

Karakteristik responden berdasarkan penghasilan perbulan pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden memiliki penghasilan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Responden yang memiliki penghasilan < Rp 500.000 sebesar 18 orang atau 51,42 %, 9 orang atau 25,71 % yang berpenghasilan Rp.500.000-Rp.1.000.000, dan 8 orang atau 22,85 % untuk yang berpenghasilan >Rp 1.000.000.

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Menurut Penghasilan

n = 35

Penghasilan per-Bulan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
< Rp 500.000	18	51,42
Rp 500.000 – Rp 1.000.000	9	25,71
> Rp 1.000.000	8	22,85

Jumlah	35	100
--------	----	-----

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, November 2011.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tonasa, proses pembangunan dan pengembangan masyarakat, terutama pembangunan desa sesungguhnya dapat dimulai secara sederhana, yaitu sesuai dengan kebutuhan, kemauan dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat secara alamiah mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya. Oleh karena itu setiap upaya pembangunan harus mempertimbangkan potensi lokal dan dinamika masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam demokratisasi pembangunan dapat berupa, Partisipasi dalam bentuk ide, Partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang/materi dan partisipasi dalam bentuk mengevaluasi hasil pembangunan. Berikut dapat dilihat penjelasan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam demokratisasi pembangunan di desa Tonasa yaitu: Partisipasi Dalam Bentuk Ide atau Pikiran, partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak terbatas pada pelaksanaan program, tetapi juga dalam menyumbang ide/pikiran serta proses pengambilan keputusan dan pemilihan program yang akan dilaksanakan. Kebijakan semacam itu memungkinkan masyarakat secara luas berpartisipasi dalam pelaksanaannya, juga dapat mendatangkan sisi positif yang lain.

Partisipasi dalam bentuk tenaga dalam hal ini diwujudkan lewat keikutsertaan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Mereka menyumbangkan tenaga untuk pembangunan seperti ikut serta membuat jalan, membuat jembatan, membangun rumah dan yang lainnya secara ikhlas tanpa upah. Bahkan tak jarang demi keikutsertaannya mereka rela untuk tidak pergi ke sawah atau ke kebun. Partisipasi dalam Bentuk Uang atau Materi,

dari sisi partisipasi yang lain, adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan bentuk uang ataupun material (bahan bangunan). Selama ini dana-dana pembangunan yang ada adalah secara swadaya dan APBD. Sedangkan untuk partisipasi dalam wujud bahan material, adalah dilakukan oleh orang-orang yang notabenehnya adalah yang berkemampuan cukup dalam segi finansial, seperti perangkat desa ataupun orang-orang yang dipandang kaya dalam masyarakat desa setempat. Mereka umumnya dimintai atau dengan suka rela menyumbangkan material bahan bangunan.

Partisipasi dalam bentuk mengevaluasi hasil pembangunan, bentuk partisipasi dalam mengevaluasi hasil pembangunan merupakan sesuatu yang penting, dimana masyarakat dapat melihat bagaimana hasil dari pembangunan itu sendiri, sesuai atau tidak dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Hasil dari evaluasi ini diharapkan sebagai tolak ukur bagi pemerintah dalam menentukan pembangunan selanjutnya.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tonasa meliputi factor pendukung antara lain: a) Faktor kesadaran masyarakat, kesadaran masyarakat dalam proses pencapaian pembangunan desa dapat diartikan sebagai salah satu unsur penting dalam pencapaian pembangunan desa. Keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja, tetapi karena adanya faktor yang mendorongnya untuk berpartisipasi; b) Faktor tingkat pendidikan masyarakat, pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan; c) Faktor pengarahan dari pemerintah desa, pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan daerah dan pembangu-

nan nasional. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat tinggal di daerah pedesaan dengan lingkungan yang memiliki potensi alam yang melimpah, lagi pula pembangunan pedesaan menyentuh langsung kepentingan masyarakat desa. Oleh sebab itu pemerintah seharusnya memberikan perhatian besar dan lebih serius terhadap pembangunan desa; d) Kesempatan atau peluang bagi masyarakat, rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi merupakan salah satu komponen untuk mencapai pembangunan desa.

Selain terdapat faktor pendukung ada juga beberapa faktor penghambat antara lain: a) Faktor fasilitas atau peralatan, untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah desa membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya. Tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang memadai akan menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor desa dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan desa dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan berbagai kegiatan lainnya; b) Faktor tingkat pendapatan masyarakat merupakan sesuatu yang urgen, dimana disini bisa dilihat tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Indikator penulis dalam menganalisa pada tingkat pendapatan ini ialah dengan membandingkan jawaban responden antara PNS yang mempunyai penghasilan >Rp 1.000.000 dan petani yang mempunyai penghasilan berkisar <Rp 500.000, saat peneliti melakukan penelitian di desa Tonasa.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah sebagai berikut: 1) Partisipasi dalam pe-

laksanaan pembangunan di desa Tonasa dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang meliputi: a) Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide atau pikiran, dengan intensitas jawaban responden pada "sering" yaitu 19 (54,28%). Dalam penyaluran aspirasi yang dilakukan kebanyakan pemerintah setempat melakukan pendekatan dalam bentuk informal yaitu pertemuan di luar forum formal dengan aparat pemerintah desa dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam pengambilan kebijakan ditingkat desa guna menyerap semua aspirasi dari masyarakat guna pengembangan dan pembangunan desa yang berkesinambungan, b) Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, jawaban responden "sering" yaitu 19 (54,28%). Umumnya mereka semuanya ikut terlibat partisipasi bentuk tenaga ini di dalam pelaksanaan pembangunan tanpa kecuali. Secara teknis sumbangan tenaga ini biasanya dilakukan secara gradual ataupun terjadwal sehingga tidak ada satupun anggota masyarakat yang tertinggal dalam menyumbangkan tenaganya. Bentuk partisipasi dalam bentuk tenaga ini adalah merupakan bentuk partisipasi yang paling tinggi, c) Partisipasi dalam bentuk uang atau materi, dengan intensitas jawaban responden "jarang" yaitu 23 (65,71%). Tingkat partisipasi dalam bentuk uang atau materi ini dipengaruhi pada tingkat pendapatan. Responden yang kebanyakan petani dengan penghasilan di bawah Rp.500.000 ini menjawab "jarang" ataupun "tidak pernah" beralasan yaitu memiliki keuangan yang tidak memungkinkan untuk disumbangkan. dan memiliki kebutuhan hidup yang mesti dipenuhi, serta d) Partisipasi dalam bentuk mengevaluasi hasil pembangunan, jawaban responden "tidak pernah" yaitu 18 (51,42%). Yang menjadi indikator utama alasan responden mengatakan tidak pernah adalah kesibukan dari masyarakat, apalagi pelaksanaan pertemuan evaluasi sering kali dilaksanakan masa waktu kerja. Dengan kurangnya pertemuan antara pemerintah desa

Tonasa dengan masyarakat desa Tonasa, mengakibatkan sering terjadi discommunication antara pemerintah dengan masyarakat tentang berbagai informasi pembangunan yang ada. Inilah yang membuat pemerintah tidak mengerti dengan kondisi dan keinginan masyarakat, begitu pula sebaliknya; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa Tonasa terdiri dari: a) Faktor Pendukung yaitu kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi, tingkat pendidikan masyarakat, faktor pengarahan pemerintah desa dan pemberian kesempatan dan peluang bagi masyarakat dan b) Faktor Penghambat yaitu fasilitas atau peralatan yang tersedia dan faktor tingkat pendapatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatah, Eep Saefulloh, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1994.
- Fuady, Munir, Konsep Negara Demokrasi. Refika aditama, Bandung. 2010.
- Lane, Jan-lane, Demokratisasi dan Pertumbuhan, Rajagrafindo persada, 2002.
- Dahl, A Robert, Perihal Demokrasi. Yayasan Obor Indonesia Jakarta, 2011.
- Faried, Ali, Studi tentang Kebijakan Pemerintahan. Makassar. 2011.
- Abipraja Soedjono. Perencanaan Pembangunan Di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 2002.
- Brata, I Nyoman, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Coralie Bryant, Lousie G White., Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1987.
- Daldjoeni N, Suyitno A, Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan, Alumni, Bandung 1985.
- Direktur Jenderal Pembangunan Desa. Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa. Penebar Swadaya, Jakarta, 1996.
- Hagul, Peter, Pembangunan Desa dan Lembaga Sosial Di Pedesaan, Cetakan I, CV.Rajawali, Jakarta 1985.
- Koentjaraningrat., Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan, PT Gramedia Utama, Jakarta 2002.
- Maskun, Sumitro, Pembangunan Masyarakat Desa, Media Widya Mandala, Yogyakarta 1993.
- Ndraha, Talidzuhu, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) , PT. Asdi Mahasatya, Jakarta 2003.
- Madani, Muhlis, Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik, Graha Ilmu, Jakarta, 2011.
- Prasadja, Buddy, Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinan, CV Rajawali, Jakarta 1980.
- Sjahrir dan Korten, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Soetomo, Pembangunan Masyarakat (Beberapa Tinjauan Pustaka), Liberty Yogyakarta, 1990.
- Sumaryadi Nyoman. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, Citra Utama, Jakarta, 2005.
- Usman, Sunyoto. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- Widjaja, HAW, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2007.

Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2003.

Widjaja, HAW, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2007.

-----, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli, Bulat dan Utuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005.

-----, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, PT Raja Grfindo Persada, Jakarta 2002.

-----, Pemerintahan Desa/Marga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.

DOKUMEN DAN SUMBER LAINNYA

Undang Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan daerah Kabupaten Gowa No 5 tahun 2001 tentang struktur Pemerintah Desa.

Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi. Makassar. Fisip Unhas. 2008/2009.